

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Obyek Penelitian

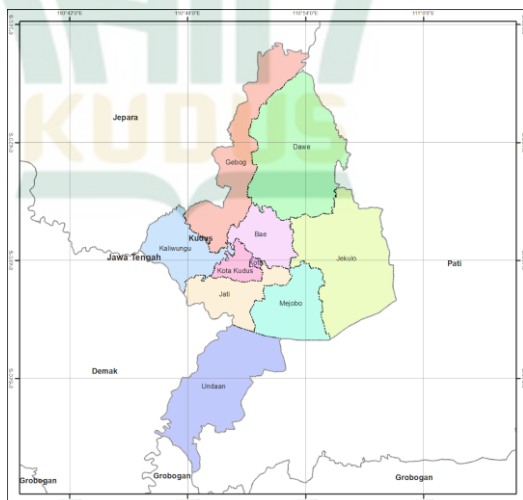
a. Profil Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus terletak diantara kota-kota besar seperti: Jepara, Demak, Purwodadi, dan Pati. Letaknya di jalur Pantura (pantai utara) diantara Kabupaten Semarang dan Surabaya. Kabupaten Kudus mempunyai luas wilayah sebesar 425,15 km² dengan tingkat kepadatan populasi sebanyak 849,184 jiwa. Secara astronomis Kabupaten Kudus terletak antara koordinat 06°51'-07°16' LS dan 110°36'-110°50' BT. Secara administratif terbagi dalam 9 kecamatan, 132 desa dan kelurahan.

Batas wilayah Kabupaten Kudus terdiri sebagai berikut:

- 1) Bagian utara: Kabupaten Jepara dan Pati
- 2) Bagian timur: Kabupaten Pati
- 3) Bagian selatan: Kabupaten Grobogan dan Pati
- 4) Bagian barat: Kabupaten Demak dan Jepara.

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Kudus



Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan (yaitu Gunung Muria), dengan puncak Puncak Saptorenggo (1.602 m dpl), Puncak Rahtawu (1.522 m dpl), dan Puncak Argojembangan (1.410 m dpl). Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kabupaten Kudus memiliki sembilan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Berikut merupakan tabel data luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kudus:

Tabel 4.1. Kondisi Geografis Kabupaten Kudus

Kecamatan <i>Sub District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas Total Area <i>(km²/sq.km)</i>	Persentase Terhadap Luas Wilayah <i>Percentage to Area</i>
1 Kaliwungu	Kedungdowo	32,713	7,69
2 Kota	Purwosari	10,473	2,46
3 Jati	Tanjung karang	26,298	6,19
4 Undaan	Undaan Kidul	71,770	16,88
5 Mejobo	Jepang	36,766	8,65
6 Jekulo	Klaling	82,917	19,50
7 Bae	Bae	23,323	5,49
8 Gebog	Gondosari	55,060	12,95
9 Dawe	Piji	85,837	20,19
Jumlah pada Kabupaten Kudus		425,15	100,00

Sumber : <https://kuduskab.bps.go.id>

Luas Penggunaan lahan dari luas Kabupaten Kudus sebesar 42.516 Ha, penggunaan lahan terbagi menjadi lahan persawahan, lahan kering dan peruntukan lahan lainnya. Lahan persawahan Di Kabupaten Kudus seluas 21.704 Ha terdiri dari:

- 1) Sawah berpengairan teknis seluas 4.203 Ha
- 2) Sawah berpengairan setengah teknis 5.756 Ha
- 3) Sawah berpengairan sederhana seluas 3.429 Ha
- 4) Sawah tadah hujan seluas 7.698 Ha
- 5) Lainnya (rawa dan sungai) seluas 618 Ha

Lahan kering di Kabupaten Kudus seluas 18.552 Ha terdiri dari:

- 1) Bangunan dan halaman 9.983 Ha
- 2) Tegal, kebun, ladang, huma seluas 6.100 Ha
- 3) Sementara tidak diusahakan 168 Ha
- 4) Lahan untuk tanaman kayu dan hutan rakyat 139 Ha
- 5) Perkebunan negara 112 Ha
- 6) Hutan negara 1.882 Ha
- 7) Lainnya 168 Ha

Banyak sekali lahan yang bisa dimanfaatkan potensinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus. Belum lagi pada sektor industri cukai atau perusahaan rokok. Kabupaten Kudus mempunyai julukan Kota Kretek karena banyaknya penghasil produksi rokok. Pada tahun 2020 tercatat sektor penyumbang pajak terbesar sebanyak Rp 1,068 triliun adalah pada sektor industri pengolahan.¹³⁰ Dan pada tahun 2021 terdapat kenaikan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta pajak bea perolehan hak tanah bangunan (BPHTB).¹³¹

Pada sektor pariwisata Kabupaten Kudus juga tidak kalah dari Kabupaten-Kabupaten yang lain karena pada Kabupaten Kudus terkenal dengan sektor pariwisata halalnya. Kabupaten Kudus terkenal sebagai Kabupaten paling agamis di Jawa Tengah dan terdapat makam Sunan Kudus dan makam Sunan Muria. Dengan sejarah islami yang begitu terkenal. Menurut Ina Mistriani kabupaten Kudus bisa menjadi salah satu objek wisata halal yang ada di Jawa Tengah. Serta ini bisa menjadi potensi yang bisa digali di Kabupaten Kudus untuk meningkatkan perekonomian.¹³²

¹³⁰ “Penerimaan Pajak Kudus 2020 Meningkat, Sektor Industri Pengolahan Penyumbang Terbanyak | MURIANEWS,” 18 Februari 2021, <https://www.murianews.com/2021/02/18/207257/penerimaan-pajak-kudus-2020-meningkat-sektor-industri-pengolahan-penyumbang-terbanyak>.

¹³¹ Home dkk., “Penerimaan pajak Kabupaten Kudus 2021 tumbuh 17,69 persen,” Antara Jateng, diakses 2 November 2022, <https://jateng.antaranews.com/berita/426321/penerimaan-pajak-kabupaten-kudus-2021-tumbuh-1769-persen>.

¹³² “Pengamat: Kudus Bisa Jadi Destinasi Wisata Halal | Milenial,” diakses 2 November 2022, <https://www.gatra.com/news-469377-milenial-pengamat-kudus-bisa-jadi-destinasi-wisata-halal.html>.

b. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus

Pendapatan Asli Daerah yakni pendapatan yang didapat daerah dari berbagai sumber. Sumber PAD Kabupaten Kudus bersumber dari 4 macam, yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah dan, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), juga pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Berbagai macam sumber PAD juga perlu ditunjang oleh berbagai macam aspek, baik pendanaan dari pemerintah pusat maupun fasilitas yang memadai.

Berdasarkan data Pendapatan asli daerah pada tahun 2011-2020 Kabupaten Kudus yang berhasil peneliti kumpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Data Pendapatan PAD Kabupaten Kudus 2011-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)
2011	108 458,83
2012	121 017,03
2013	144 995,09
2014	234 073,38
2015	259 295,91
2016	291 805,51
2017	366 031,21
2018	337 364,61
2019	343 823,56
2020	383 884,19

Sumber : *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2012-2021, BPS Kota Kudus 2022*

Tabel 4.2 diketahui pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 383.884,19 Juta rupiah. Pendapatan PAD terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 108.458,83 Juta rupiah. Dan rata-rata dari tahun 2011-2020 pendapatan asli daerah mencapai 259.074,93 Juta rupiah. Peningkatan dari tahun ke tahun

terjadi karena adanya peningkatan dari berbagai sumber PAD dan sumber pendukung lainnya.

c. Pajak Daerah

Pajak Daerah ialah kewajiban menyumbang kekayaan yang dijalankan secara paksa tanpa ada balas jasa secara langsung, dan semua pendapatan pajak digunakan untuk keperluan pembangunan atau kepentingan pemerintahan. Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan PAD. Besar Kecilnya Pajak daerah akan mempengaruhi pendapatan PAD.

Berdasarkan data Pajak daerah pada tahun 2011-2020 Kabupaten Kudus yang berhasil peneliti kumpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Data Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kudus 2011-2020

Tahun	Pajak Daerah (Juta Rupiah)
2011	36 687,74
2012	38 572,03
2013	58 194,21
2014	63 085,73
2015	78 860,99
2016	84 453,87
2017	103 927,60
2018	114 155,44
2019	125 762,59
2020	126 240,58

Sumber : *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2012-2021, BPS Kota Kudus 2022*

Tabel 4.3 diketahui pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar 126.240,58 Juta rupiah. Pendapatan pajak daerah paling rendah pada tahun 2011 sebesar 36.687,74 Juta rupiah. Dan rata-rata dari tahun 2011-2020 pajak daerah mencapai 82.994,07 Juta rupiah. Peningkatan dari tahun ke

tahun terjadi karena adanya peningkatan dari berbagai pajak yang ada seperti pajak perorangan maupun badan yang semakin banyak.

d. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan sebuah pembayaran timbal balik atas penggunaan jasa atau fasilitas dari pemerintah. Banyak sedikitnya retribusi tergantung pada banyak atau sedikit pelayanan dan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk dimanfaatkan masyarakat umum. Retribusi juga termasuk dalam komponen PAD. Retribusi meningkat akan menjadikan keuangan daerah ikut bertambah.

Berdasarkan data retribusi daerah pada tahun 2011-2020 Kabupaten Kudus yang berhasil peneliti kumpulkan diantaranya:

Tabel 4.4. Data Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus 2011-2020

Tahun	Retribusi Daerah (Juta Rupiah)
2011	54 599,12
2012	13 865,92
2013	15 588,52
2014	21 083,38
2015	18 093,28
2016	16 799,37
2017	19 849,73
2018	18 367,33
2019	20 054,98
2020	18 493,58

Sumber : *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2012-2021, BPS Kota Kudus 2022*

Tabel 4.4 diketahui retribusi daerah dari tahun ke tahun mengalami naik turun serta pada penghujung tahun terdapat kemerosotan. Pendapatan retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 54.599,12 Juta rupiah. Pendapatan retribusi daerah paling rendah pada tahun 2012

sebesar 13.865,92 Juta rupiah. Dan rata-rata dari tahun 2011-2020 retribusi daerah mencapai 21.679,52 Juta rupiah. Naik turunnya pendapatan retribusi memperlihatkan bahwa pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan serta penurunan. Namun bukan hanya retribusi daerah yang bisa mempengaruhi PAD, ada hal lain seperti adanya perimbangan keuangan atau yang lainnya.

e. **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana alokasi umum yakni dana dari APBD yang dialokasikan dan digunakan untuk pemerataan keuangan daerah. DAU adalah sebuah Pelaksanaan dari asas desentralisasi dalam otonomi daerah. DAU ada untuk mengurangi ketimpangan daerah dalam hal keuangan. Semakin sedikit DAU yang masuk maka semakin mandiri daerah tersebut.

Berdasarkan data Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2011-2020 Kabupaten Kudus yang berhasil peneliti kumpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Data Pendapatan Dana Alokasi Umum Kabupaten Kudus 2011-2020

Tahun	Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)
2011	488 819,99
2012	637 615,36
2013	719 406,94
2014	795 851,85
2015	784 919,18
2016	822 153,77
2017	807 711,17
2018	807 059,99
2019	834 434,86
2020	757 097,37

Sumber : *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2012-2021, BPS Kota Kudus 2022*

Tabel 4.5 diketahui Dana Alokasi Umum dari tahun ke tahun mengalami naik turun namun di penghujung tahun mengalami penurunan. Pendapatan Dana Alokasi Umum tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 834.434,86 Juta rupiah. Pendapatan Dana Alokasi Umum paling rendah pada tahun 2011 sebesar 488.819,99 Juta rupiah. Dan rata-rata dari tahun 2011-2020 Dana Alokasi Umum mencapai 745.507,04 Juta rupiah. Naik turunnya pendapatan Dana Alokasi Umum menunjukkan bahwa daerah berusaha untuk mandiri dan menggunakan anggaran DAU untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui data yang diolah pada saat regresi tidak terjadi kesalahan atau datanya bias dan konsisten.

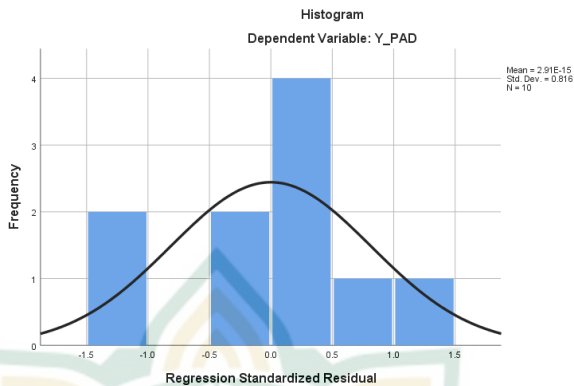
1) Uji Normalitas

Uji Normalitas data dijalankan dengan memakai uji analisis grafik (Histogram dan P-P Plot), dengan tujuan apakah data variabel mempunyai distribusi normal atau tidak.¹³³ Bisa dilihat dengan dasar jika data grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal (tidak kekiri ataupun kekanan tapi pas di tengah) dan dengan melihat data P-P Plot menyebar di antara garis diagonal juga mengikuti garis diagonalnya.¹³⁴ Uji hasil regresi menggunakan IBM SPSS 26 hasil outputnya sebagai berikut:

¹³³ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*, 196.

¹³⁴ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*, 198–199.

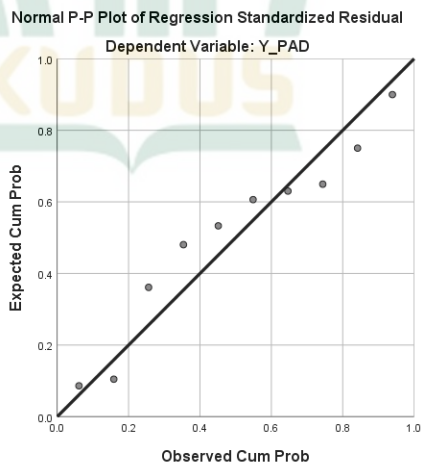
Gambar 4.2. Grafik Histogram



Sumber : Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022

Gambar 4.2 grafik histogram bisa di pahami grafik histogram menunjukkan bahwa grafik tidak menceng kekiri ataupun kekanan tetapi posisi di tengah, dan grafik histogram menunjukkan pola normal. Dengan hasil tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa model regresi telah mencukupi uji normalitas. Artinya data yang digunakan berdistribusi atau bersebaran dengan normal.

Gambar 4.3. P-P Plot



Sumber : Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022

Gambar 4.3 pada uji normalitas dengan P-P Plot, data yang ada menyebar disekitar garis diagonal juga mengikuti arah lurus garis diagonalnya. Maka bisa diketahui bahwa data yang ada sudah mencukupi uji normalitas dan data berdistribusi/bersebaran normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas mempunyai tujuan untuk mengetahui korelasi antar variabel bebas satu dengan variabel bebas yang lain (korelasi antar variabel X).¹³⁵ Dalam Uji multikolinearitas ini bisa dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) yakni apabila nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas. Adapun hasilnya bisa ditinjau pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
X1 Pajak daerah	0,407	2,458	Tidak terdapat problem multikoliniearitas
X2 Retribusi Daerah	0,385	2,600	Tidak terdapat problem multikoliniearitas
X3 DAU	0,210	4,753	Tidak terdapat problem multikoliniearitas
Sumber : Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022			

Tabel 4.6 hasil uji Multikolinearitas menunjukkan nilai semua variabel independen pada kolom tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF kurang dari angka 10. Dengan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel bebas dalam model regresi yang digunakan yakni X1 Pajak daerah, X2 Retribusi daerah, dan X3 DAU, tidak terdapat problem multikoliniearitas dan masih layak serta bisa dilanjutkan untuk uji lainnya.

¹³⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*, 157.

variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tidak adanya problem Heteroskedastisitas bisa diketahui bahwa model regresi layak dipakai untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus, berdasarkan masukan variabel bebas pajak daerah, retribusi daerah, serta dana alokasi umum.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan guna menguji apakah pada model regresi linear ada kesalahan pengganggu di periode t dengan kesalahan di periode $t-1$ (sebelumnya).¹³⁸ Uji autokorelasi bisa diketahui dengan melihat tabel 4.8, pada hasil pengujian dengan SPSS 26 sebagai berikut:

Tabel 4.8. Hasil Uji Autokorelasi

Jumlah Data	Durbin-Watson	Kesimpulan
10	2,296	Tidak terjadi korelasi negatif

Sumber : *Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022*

Tabel 4.8 diketahui bahwa:

$n: 10$

$k: 3$

$dl: 0,5253$

$du: 2,0163$

$d: 2,296$

maka $(4-du) = 4 - 2,0163 = 1,9837$

$(4-dl) = 4 - 0,5253 = 3,4747$

Kesimpulannya $4 - du \leq d \leq 4 - dl$ artinya tidak ada korelasi negatif.

¹³⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*, 162.

b. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dipakai guna mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum) pada variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Hasil analisis linier berganda dalam riset ini yaitu:

Tabel 4.9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-189963,602	157645,467	
X1 Pajak daerah	2,404	,485	0,783
X2 Retribusi daerah	1,193	1,433	0,135
X3 DAU	0,300	0,212	0,311

Sumber : *Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022*

Dari hasil tabel tersebut dapat diketahui model regresi linier berganda seperti berikut ini:

$$PAD = a + \beta_1 PD_1 + \beta_2 RD_2 + \beta_3 DAU_3 + \varepsilon$$

$$PAD = -189963,602 + 2,404PD_1 + 1,193RD_2 + 0,300DAU_3 + \varepsilon$$

Hasil persamaan regresi linear berganda diatas bisa dijelaskan bahwa:

- (a) Skor konstanta sebesar -189963,602 bernilai negatif dapat diartikan bahwa jika nilai variabel bebas yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Dana Alokasi Umum (X3) dianggap konstan atau nol maka Pendapatan Asli Daerah (Y) tetap senilai -189963,602 atau sebesar -189.963,602 Juta rupiah dengan variabel lainnya yang tetap.
- (b) Koefisien regresi pada pajak daerah 2,404, artinya bahwa setiap kenaikan atau penurunan 1 satuan pajak daerah, maka pendapatan asli daerah akan

meningkat senilai 2,404 juta rupiah atau akan turun sebesar 2,404 juta rupiah dengan variabel lainnya tetap.

- (c) Koefisien regresi pada retribusi daerah sebesar 1,193, artinya bahwa setiap kenaikan atau penurunan 1 satuan retribusi daerah, maka Pendapatan Asli Daerah akan naik senilai 1,193 juta rupiah atau akan turun sebesar 1,193 juta rupiah dengan variabel lainnya tetap.
- (d) Koefisien regresi pada dana alokasi umum yaitu 0,300, artinya bahwa setiap kenaikan atau penurunan 1 satuan dana alokasi umum, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,300 juta rupiah atau akan turun sebesar 0,300 juta rupiah dengan variabel lainnya tetap.
- (e) Koefisien e (ϵ) atau error menunjukkan adanya variabel lain yang tidak dicantumkan dalam riset ini dan variabel lain tersebut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

2) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besaran persentase pengaruh hubungan variabel independen pada variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi kisaran antara angka 0 sampai 1. Nilai determinasi bila mendekati angka 1, maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, begitupun sebaliknya, bila mendekati 0 maka kian kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.¹³⁹ Adapun hasil pengujian koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.10. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,969 ^a	0,939	0,909

Sumber : *Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022*

¹³⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*, 147.

Dari tabel 4.10 didapatkan perolehan R square senilai 0,939 atau 93,9%. Artinya, 93,9% sumbangan pengaruh variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum bisa menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan di riset ini.

3) Uji Simultan (f)

Uji Simultan atau Uji f dijalankan guna melihat analisa pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah secara serentak. Koefisien di model regresi diuji secara serentak atau bersama-sama guna melihat apakah secara bersama-sama/serempak variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.¹⁴⁰ Untuk mengetahuinya bisa dilihat dari nilai f hitung > f tabel. Hasil uji statistiknya adalah berikut ini:

Tabel 4.11. Hasil Uji Simultan (f)

Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	F	Sig.	Kesimpulan
PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Pajak daerah, Retribusi daerah, serta DAU	30,802	0,000 ^b	Pajak daerah, retribusi daerah, dan DAU secara simultan mempunyai pengaruh terhadap PAD.

Sumber : *Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.11 dari uji ANOVA atau f test di dapat nilai f hitung sebesar 30,802 dengan signifikansi 0,000. Pengujian ini dilihat dari nilai f hitung dan nilai signifikan 0,05. Berikut ini keteranganya:

- (a) Dilihat dari f hitung > f tabel akan menunjukkan variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat. Bisa diketahui seperti berikut:

¹⁴⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*, 148.

$$n \text{ (sampel)} = 10$$

$$k \text{ (variabel penelitian)} = 4$$

$$df1 : k-1 = 4-1 = 3$$

$$df2 : n-k = 10-4 = 6$$

Dilihat di tabel distribusi f.

$$\text{Maka } f \text{ tabel} = 4,76$$

$$f \text{ hitung} = 30,802$$

Nilai f hitung (30,802) > f tabel (4,76), oleh karena itu variabel bebas (pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (PAD).

- (b) Berdasarkan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ maka hasil regresi bisa dipakai guna memperkirakan PAD, serta memberikan keterangan bahwa salah satu atau semua variable independen (pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum) signifikan mempengaruhi PAD.

Dari keterangan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4) Uji Parsial (t)

Uji Parsial atau Uji t dipakai guna melihat pengaruh dari tiap-tiap variabel independen (X) secara individu dalam menjelaskan/mempengaruhi variabel terikat (Y). Uji t bisa dijalankan dengan melakukan perbandingan signifikansi t hitung dan t tabel dengan beberapa aturan, yaitu:

- (a) Apabila t hitung < t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak untuk $\alpha = 5\%$ atau signifikansi > 0,05
 (b) jika t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima untuk $\alpha = 5\%$ atau signifikansi < 0,05.¹⁴¹

Dengan keterangan hipotesis:

H_0 : Satu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

H_a : Satu variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

¹⁴¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*, 149.

Di bawah ini adalah hasil uji statistik yang sudah dijalankan adalah:

Tabel 4.12. Hasil Uji Parsial (t)

Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	t	Sig.	Kesimpulan
PAD (Pendapatan Asli Daerah)	X1 Pajak daerah	4,952	0,003	Berpengaruh
	X2 Retribusi daerah	0,832	0,437	Tidak Berpengaruh
	X3 DAU	1,414	0,207	Tidak Berpengaruh

Sumber : Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022

Hasil pengujian statistik uji parsial atau uji t pada tabel 4.12 dapat dipahami dengan melihat t hitung $>$ t tabel serta menggunakan nilai signifikansi, dengan ketentuan $<$ 0,05 maka H_a diterima serta H_0 ditolak, artinya variabel X mempunyai pengaruh secara parsial pada variabel Y. Nilai t hitung dan signifikansi pada tiap variabel sudah ada di kolom hasil uji. Sedangkan t tabel diperoleh dengan cara sebagai berikut:

Diketahui:

$$n = 10$$

$$k = 4$$

$$df = n - k = 10 - 4 = 6$$

$$\text{Maka } t \text{ tabel} = 2,446$$

Berdasarkan keterangan diatas bisa dipahami kesimpulan uji t parsial sebagai berikut:

(a) Uji t antara Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Kudus Tahun 2011–2020

Tabel 4.13. Hasil Uji t Pajak Daerah

Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	t	Sig.	Kesimpulan
PAD (Pendapatan Asli Daerah)	X1 Pajak daerah	4,952	0,003	Berpengaruh

Sumber : Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022

Hasil pengujian pajak daerah (X1) diperoleh t hitung $>$ t tabel ($4,952 > 2,446$), sedangkan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 ($0,03 < 0,05$). Bisa ditarik kesimpulan H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya secara parsial Pajak daerah (X1) mempunyai pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (Y).

(b) Uji t antara Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Kudus Tahun 2011–2020

Tabel 4.14. Hasil Uji t Retribusi Daerah

Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	t	Sig.	Kesimpulan
PAD (Pendapatan Asli Daerah)	X2 Retribusi daerah	0,832	0,437	Tidak Berpengaruh

Sumber : Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022

Hasil pengujian retribusi daerah (X2) dengan ketentuan t hitung $>$ t tabel tetapi hasilnya $0,832 < 2,446$, sedangkan nilai signifikansinya harus kurang dari 0,05 namun hasil uji statistik signifikansinya $0,437 > 0,05$. Bisa disimpulkan H_a ditolak serta H_0 diterima. Berarti, secara parsial Retribusi daerah (X2) tidak mempunyai pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (Y). Karena nilai signifikansinya 0,437 lebih besar dari 0,05 dan t hitung kurang dari t tabel.

(c) Uji t antara Dana Alokasi Umum terhadap PAD Kabupaten Kudus Tahun 2011–2020

Tabel 4.15. Hasil Uji t Dana Alokasi Umum

Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	t	Sig.	Kesimpulan
PAD (Pendapatan Asli Daerah)	X3 DAU	1,414	0,207	Tidak Berpengaruh

Sumber : *Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022*

Hasil pengujian dana alokasi umum (X3) dengan ketentuan t hitung lebih dari t tabel tetapi hasilnya 1,414 < 2,446, sedangkan nilai signifikansinya harus kurang dari 0,05 namun hasil uji statistik signifikansinya 0,207 > 0,05. Bisa disimpulkan H_a ditolak serta H_0 diterima. Berarti secara parsial dana alokasi umum (X3) tidak mempunyai pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (Y). Karena nilai signifikansinya 0,207 lebih besar dari 0,05 dan t hitung kurang dari t tabel.

B. Pembahasan

Dari hasil riset yang telah dijalankan diatas, hasilnya kemudian di analisis mengenai pengaruh antar variabel, yaitu Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Dana Alokasi Umum terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020. PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pelayanan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah.¹⁴²

Tingginya PAD pada daerah bisa mempengaruhi perekonomian untuk berkembang pada suatu daerah. Kian tinggi PAD yang didapat maka kian tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Menurut Prof. Caruni Mulya Firdausy, tingginya PAD pada suatu daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mardiasmo berpendapat juga jika terjadi pertumbuhan PAD terus terjadi akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, tetapi eksploitasi PAD akan mengancam perekonomian secara makro.¹⁴³

¹⁴² Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 18.

¹⁴³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 87.

PAD pada Kabupaten Kudus meliputi beberapa sumber. Sumber pendapatan tersebut di dapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan, serta lain-lain PAD yang sah. Sumber pendapatan tertinggi pada Kabupaten Kudus selama lima tahun terakhir berdasarkan sumber data BPS berada pada tahun 2020 dari pendapatan pajak daerah. Kenaikan dan penurunan PAD bisa terjadi karena sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan, serta lain-lain PAD yang sah, yang mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil dari penelitian ini hampir sama dengan keterangan tersebut. Adapun hasil dari analisa dan hasil pembahasan penelitian diantaranya:

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020

Data realisasi Pajak daerah yang diperoleh dari BPS Kabupaten Kudus dan data pendukung setelah diolah dengan pengujian statistic dan di analisa, hasilnya hipotesis yang diduga pajak daerah mempunyai pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah itu benar/diterima. Hal ini ditunjukkan pada uji parsial (t) dari pajak daerah, nilai t hitung sebesar 4,952 lebih besar dibanding t tabel 2,446, sedangkan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 ($0,03 < 0,05$). Maka H_a diterima dan H_0 ditolak, atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011–2020.

Kenaikan tenaga kerja menjadikan peningkatan pada sektor produksi. Karena tiap ada penambahan pekerja maka akan ada penambahan pendapatan pajak. Jika tenaga kerja meningkat maka banyak dari pekerja yang akan membayar pajak atas penghasilan dari pekerjaannya. Banyaknya pembayaran akan meningkatkan dan menjadikan pajak daerah meningkat. Sifat pajak yang wajib di bayarkan walaupun tidak mendapatkan timbal balik secara langsung menjadikan pendapatan pajak tetap pada ketentuannya. Hasil ini sesuai dengan teori robert solow bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tercapai jika pertumbuhan output terjadi. Pertumbuhan output terjadi karena ada dua faktor input, yaitu modal dan tenaga kerja dikombinasikan, sedangkan faktor teknologi dianggap tidak berubah atau konstan.¹⁴⁴

Hasil riset ini juga menunjukkan kesamaan dengan hipotesis pertama yang dijalankan oleh peneliti lain. Seperti riset yang dijalankan oleh Yusmalina, Lasita, dan Fauzan Haqiqi, di

¹⁴⁴ Sudarmanto dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, 18.

kabupaten karimun 2020, menyebutkan bahwa pajak daerah secara parsial mempunyai pengaruh PAD. Kesamaan riset yang dilakukan oleh Ananda Isnaini Rahmawati di Kota Magelang 2020, menyatakan secara parsial pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap PAD.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020

Dari data realisasi retribusi daerah dan data pendukung setelah diolah dengan pengujian statistic dan di analisa, hasilnya hipotesis yang diduga retribusi daerah mempunyai pengaruh pada pendapatan asli daerah itu salah/tidak diterima. Hal ini ditunjukkan pada uji parsial (t) dari retribusi daerah, nilai t hitung senilai 0,832 lebih kecil dibanding t tabel 2,446, sedangkan angka signifikansinya lebih dari 0,05 ($0,437 > 0,05$). Maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima atau dengan kata lain bisa ditarik kesimpulan bahwa secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011–2020.

Penyebabnya disebabkan karena perorangan ataupun kebocoran pendapatan. Batasan yang telah dibuat oleh pemerintah bisa di acuhkan oleh beberapa pihak.¹⁴⁵ Kecurangan salah satu pihak yang menggunakan fasilitas pemerintah bisa terjadi saat proses dan akan merugikan pemerintah. Pemerintah telah membuat aturan dan batasan untuk menjadikan retribusi daerah semakin efektif dan efisien dengan memperhatikan lingkungan, tetapi tetap ada beberapa permasalahan yang ada. Hasil sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan organisasi secara berkelanjutan melakukan kegiatannya dengan batasan yang ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai sosial serta reaksi pada batasan tersebut mendorong urgensi perilaku organisasi dengan melihat lingkungan. Namun masih ada beberapa permasalahan yang terjadi.

Penyebab lainnya karena kurangnya inovasi dari pengusaha yang menggunakan fasilitas dari pemerintah. Kurangnya inovasi mengakibatkan usaha seseorang mengalami kebangkrutan. Akibatnya usaha tersebut tidak lagi menggunakan fasilitas pemerintah. Jika inovasi dilakukan terus-menerus pada

¹⁴⁵ Raka F Pujangga, "Plt Bupati Kudus Hartopo Akan Terapkan Transaksi Non Tunai, Cegah Kebocoran Retribusi - Tribunjateng.com," diakses 12 Januari 2023, <https://jateng.tribunnews.com/2020/01/30/plt-bupati-kudus-hartopo-akan-terapkan-transaksi-non-tunai-cegah-kebocoran-retribusi>.

usaha-usaha yang ada di Kabupaten Kudus maka pelaku usaha yang menggunakan fasilitas pemerintah akan meningkat. Teori Schumpeter menyatakan bahwa faktor terpenting dalam perekonomian adalah inovasi yang merupakan kreatifitas para wiraswasta atau pengusaha dalam memunculkan kombinasi baru.¹⁴⁶ Inovasi dari pemerintah dalam bidang pengelolaan fasilitas retribusi yang kurang maksimal bisa menjadi penyebab terjadinya retribusi semakin menurun. Kurangnya inovasi yang baru menjadikan fasilitas yang ada tidak selengkap daerah lain. Sehingga memicu para pelaku usaha enggan menggunakan fasilitas pemerintah dan menurunkan pendapatan peneanaan retribusi daerah.

Hasil riset ini menunjukkan kesamaan dengan hasil yang dijalankan oleh peneliti lain. Seperti riset yang dijalankan oleh Rukmana Is Lampunu dan Ratna Ambar Mintarsih, di provinsi daerah istimewa yogyakarta 2020, menyebutkan bahwa retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020

Data realisasi dana alokasi umum dan data pendukung setelah diolah dengan pengujian statistic dan di analisa, hasilnya hipotesis yang diduga dana alokasi umum mempunyai pengaruh pada pendapatan asli daerah itu salah/tidak mempunyai pengaruh pada PAD. Hal ini ditunjukkan pada uji parsial (t) dari dana alokasi umum, nilai t hitung senilai 1,414 lebih kecil dibanding t tabel 2,446, sedangkan nilai signifikansinya lebih dari 0,05 ($0,207 > 0,05$). Maka H_a ditolak, dan H_0 diterima atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara parsial dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011–2020.

Penyebabnya terjadi karena penggunaan DAU tidak digunakan pada peningkatan keuangan daerah saja tetapi digunakan pada sektor yang lainnya seperti sektor kesehatan, sektor pertanian, sektor sosial, dan pada sektor lainnya tergantung kebijakan pada daerah tersebut. Hal ini sesuai pada informasi dari Katadata.co.id DAU digunakan pada sektor kesehatan untuk penanganan Covid-19.¹⁴⁷ Jadi DAU tidak

¹⁴⁶ Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, 98.

¹⁴⁷ “Covid-19 Melandai, Pemda Akan Dibebaskan Pakai Anggaran DAU dan DBH - Makro Katadata.co.id,” 18 Oktober 2021,

digunakan untuk satu sektor saja tetapi ada sektor yang lain. Teori yang dikemukakan oleh Harrod dan Domar menyatakan jika perolehan aset keuangan semakin tinggi seharusnya dimasa yang akan datang akan meningkatkan keadaan suatu daerah menjadi lebih baik. Jika penggunaan DAU bisa dilakukan lebih baik dan efisien untuk sektor pendapatan daerah, maka bisa meningkatkan besar kecilnya PAD. Namun pada praktiknya pendapatan DAU digunakan untuk berbagai sektor bukan hanya untuk peningkatan pendapatan daerah tapi pada sektor yang lainnya.

Penyebab lain karena DAU bukan sumber pendapatan dari PAD. Karena DAU hanya dana perimbangan untuk memberikan keseimbangan keuangan antar daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: “pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.”¹⁴⁸

Hasil riset ini menunjukkan kesamaan dengan hasil yang dijalankan oleh peneliti lain. Contohnya riset yang dijalankan oleh Muhammad Harris Maulana dan Algifari, di provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, hasilnya menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berdampak positif pada variabel Pendapatan Asli Daerah.

<https://katadata.co.id/maesaroh/finansial/616d8010b3c1a/covid-19-melandai-pemda-akan-dibebaskan-pakai-anggaran-dau-dan-dbh>.

¹⁴⁸ Rizqy Ramadhan, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara,” 83.